

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah “bagaimana implikasi *Weapons Program Sanctions* terhadap upaya reunifikasi Korea Selatan-Korea Utara?”, dapat disimpulkan bahwa tindakan Korea Utara yang melakukan pelanggaran terhadap *Weapons Program Sanctions* memberi pengaruh besar terhadap reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan, terutama melalui sudut pandang Korea Selatan itu sendiri. Sembilan sanksi senjata yang diberikan terhadap Korea Utara oleh Dewan Keamanan PBB justru tidak diindahkan oleh Korea Utara sejak pertama kali sanksi terkait nuklir tersebut diberikan. Segala batasan dan pelarangan yang berdampak pada perekonomian Korea Utara pun tidak membuat negara tersebut menghentikan peningkatan persenjataan nuklir dan rudal balistik bahkan uji coba yang dilakukan terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya faktor internal dan eksternal tersebut, menghasilkan kebijakan atau tindakan Korea Utara yang secara ‘optimis’ melanggar *weapons program sanctions*, meningkatkan ketegangan di kawasan regionalnya, bahkan menjadikan *weapons program sanctions* sebagai hal yang menghambat proses perdamaian untuk menghasilkan reunifikasi Korea.

Hal tersebut tentunya mengakibatkan negara-negara yang berada pada kawasan regionalnya merasa perlu meningkatkan kewaspadaan apabila suatu saat terjadi hal di luar kendali. Rasa takut dan waspada tersebut tentunya dimiliki oleh

Korea Selatan sebagai negara yang hingga saat ini sedang mengupayakan pembicaraan perdamaian yang sesungguhnya atau keinginan untuk tercapainya reunifikasi dengan Korea Utara. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh Korea Selatan berupa kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat menekan Korea Utara untuk tidak terus mengembangkan persenjataan nuklir dan rudal balistiknya. Mulai dari, peluncuran sistem THAAD, meningkatkan latihan bersama militer dengan Amerika Serikat hingga memberi sanksi independen terhadap Korea Utara telah dilakukan oleh Korea Selatan namun belum membuahkan hasil.

Upaya-upaya tersebut justru semakin meningkatkan ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara, bahkan membuat Korea Utara kembali melanggar resolusi DK PBB sehingga Korea Selatan mengkhawatirkan perilaku Korea Utara di masa depan semakin mempengaruhi struktur sistem negaranya terutama dalam segi keamanan domestiknya. Oleh karena itu, respon Korea Selatan berupa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah negaranya terhadap aktivitas Korea Utara yang melanggar keberadaan sanksi program senjata tersebut mempengaruhi bagaimana keberjalanan upaya reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara yang justru memperoleh dampak buruk karena sikap Korea Utara yang semakin memberontak akan kehadiran berbagai sanksi tersebut.

4.2. Saran

Mengacu pada hasil penelitian dan simpulan, penulis dapat memberikan saran di mana untuk penelitian selanjutnya, data akan lebih baik lagi apabila hasil yang diperoleh berasal dari hasil wawancara secara langsung oleh pihak yang dapat

mendukung jawaban pada hasil penelitian seperti halnya seorang politisi berupa duta besar serta jajaran stafnya dari Korea Selatan atau setidaknya seorang diplomat dari Korea Selatan. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan suatu penelitian yang menunjukkan sudut pandang Korea Utara sebagai negara yang memperoleh *Weapons Program Sanction* yang diberikan oleh DK PBB. Kemudian untuk saran yang dapat penulis berikan terhadap Korea Utara dan Korea Selatan yang berkaca dari pemberian *weapons program sanctions* DK PBB terhadap Korea Utara demi menekan tindakan persenjataan Korea Utara yang mengancam kawasan regionalnya yakni dua Korea dapat mengambil contoh salah satu proses reunifikasi yang berhasil dilakukan oleh beberapa negara. Seperti halnya apa yang telah dilakukan Yaman Utara dan Yaman Selatan yang berhasil melakukan reunifikasi pada tahun 1990, seperti halnya memperbaiki hubungan diplomatik, melakukan negosiasi kembali terutama insentif ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak, atau bahkan memperkuat dukungan dari rakyat kedua negara tersebut untuk bersama melakukan persatuan nasional hingga penyelesaian perpecahan yang sejak lama masih menemukan kegagalan pada setiap proses reunifikasi.